BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Kemajuan teknologi informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan keseluruh lapisan masyarakat. Teknologi informasi merupakan suatu acuan bagi negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Perkembangan teknologi di bidang pemerintahan, yang disebut dengan *e-Government*. Pemerintah memfokuskan diri pada teknologi, khususnya pengembangan *e-Government* yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut kita harus selalu mengikuti *trend* sistem informasi sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu implikasi nyata yang dirasakan dari percepatan tersebut saat ini adalah munculnya berbagai bidang baru yang menuntut penguasaan teknologi informasi didalamnya.

Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan globalisasi di Indonesia mengenai teknologi informasi akan membawa manusia menuju perubahan-perubahan terhadap sikap mengenai perkembangan tersebut.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Teknologi informasi yang berbasis komputerisasi, saat ini telah menyederhanakan pekerjaan menganalisis jumlah data yang luas, dan teknologi informasi berbasis komputer tersebut dapat memudahkan dalam memanajemen sumber daya aparatur. Proses pengembangan sumber daya aparatur berupa proses pengembangan pegawai, pembinaan pegawai, serta sampai pencatatan para pegawai. Dengan adanya pengembangan sistem informasi di suatu pemerintahan akan memudahkan para pegawai dalam menyimpulkan data dan informasi dengan lebih baik.

Sistem Informasi yang berkembang pesat sekarang ini sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah dimasa moderen harus bersikap dalam melayani masyarakatnya. Inilah alasan lain mengapa di dinas perhubungan propinsi jawa barat dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranan dalam melayani masyarakat.

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya, namun juga yang diberikan pemerintah secara efektif dan efesien.

Hubungan yang erat antara dinas perhubungan propinsi jawa barat dan masyarakat sebagai pihak yang harus diperhitungkan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya haruslah diimbangi dengan peran pemerintah dan bisa memberikan sebuah standar pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Dunia informasi merupakan suatu fenomena didalam kehidupan baik di Dinas Perhubunga Propinsi Jawa Barat maupun dilingkungan masyarakat. Hal ini karena semakin majunya suatu negara atau daerah maka harus semakin efektif pelayanan sistem informasi baik dari segi sektor ekonomi , politik, perdagangan , budaya maupun sosial, oleh sebab itu, di dinas perhubungan propinsi jawa barat dalam meningkatakan kualitas kinerjanya dituntut untuk lebih efektif dan efesien, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan trasparansi .

Kinerja di dinas perhubungan propinsi jawa barat pun hendaknya ditingkatkan melalui suatu media teknologi yang semakin maju, ini dapat menunjang kinerja lebih efektif dan efesien sehingga terciptanya *good governance*. Banyak media informasi dan teknologi yang dapat dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perlu didukung dengan penggunaan teknologi dan informasi yang lebih kompetitif dalam menjalankan roda pemerintahan. Dewasa ini teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, tidak hanya sebagai tuntutan yang sangat mendesak bagi setiap orang, tetapi digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, lengkap dan akurat. Perkembangan sistem informasi memberi dampak pada bidang pelayanan dan penyampaian informasi dari dinas perhubungan propinsi jawa barat kepada masarakat.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Perkembangan teknologi di bidang pemerintahan, khususnya dalam penerapan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) pemerintah Propinsi Jawa Barat yang khususnya di Biro Kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian diharapkan dapat meningkatkan sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, dan supaya mempersiapkan pegawai yang profesional dibidangnya. Sumber daya aparatur perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi sumber daya aparatur. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu instansi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

Pengelolaan pegawai secara profesional dimulai sejak perekrutan pegawai, penyelesaian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran, dan pengembangan kariernya serta proses pemberhentian. Instansi atau lembaga, mempunyai banyak pegawai yang secara potensi berkemampuan tinggi tetapi tidak mampu berprestasi dalam kerja. Hal ini dimungkinkan karena kondisi psikologis dari jabatan yang tidak cocok, atau karena lingkungan tempat kerja yang tidak membawa rasa aman. Oleh karena itu, faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan oleh pemimpin atau kepala dalam suatu instansi atau lembaga.

Permasalahan lain dalam sumber daya aparatur diantaranya ukuran sumber daya aparatur yang masih relatif besar, susunan organisasi pemerintah yang masih belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan. Pembagian tugas antar instansi atau unit yang kurang jelas,

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

menyebabkan munculnya aparatur yang kurang profesional, dan prosedur standar yang belum tersedia secara baku serta sistem pengawasan yang masih belum efektif. Hal ini merupakan bukti, bahwa suatu organisasi maupun para aparatur belum bisa mengatur para aparatur secara maksimal serta mengarahkan para pegawai menjadi pegawai yang profesional di bidangnya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia khususnya di pemerintahan, informasi telah terbukti penting dalam pengambilan suatu keputusan dalam proses pengembangan sumber daya aparatur yang profesional. Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam proses manajemen. Dengan adanya informasi dalam sebuah organisasi pemerintahan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan mudah diselesaikan melalui interaksi antar pegawai tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai suatu keputusan dalam bertindak.

Berdasarkan kendala di atas, maka untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian dan sumber daya aparatur pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat diperlukan penempatan pegawai yang profesional dibidangnya, yang sesuai dengan keahliannya. Pegawai yang profesional di bidang inilah yang menempatkan pegawai sesuai dengan prosedur, sehingga terbentuk iklim atau suasana kerja yang harmonis. Pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas yang dilimpahkan kepadanya, merasa nyaman dan cocok dengan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat khususnya dalam penerapan sistem informasi kepegawaian dimaksudkan untuk membentuk sumber daya aparatur yang profesional dibidangnya. Selain itu, sistem informasi kepegawaian memudahkan pegawai dalam memasukan data pegawai, agar data pegawai tersebut disimpan dengan rapih dan dapat memudahkan pengolahan data kepegawaian. Data-data tersebut tidak berserakan yang akan menyebabkan suatu arsip data kepegawaian menjadi hilang, serta dalam pengelolaan pegawai dari proses pengadaan sampai pemberhentian dilakukan dengan menggunakan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Pengoptimarat lisasian kinerja pegawai melalui SIMPEG pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Babertujuan untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional serta kinerja aparatur yang berkulaitas sesuai bidangnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengambil judul Laporan KKL **"IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANEJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT"**

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas fokus masalah yang akan diteliti dalam Laporan KKL ini, penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sumber daya yang menunjang implementasi kebijakan Simpeg pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat?

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

2. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Simpeg di Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana stuktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Simpeg pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan KKL

Maksud dari Laporan KKL ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pengembangan sistem informasi manejemen dalam meningkatkan kinerja pegawai Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui sumber daya yang menunjang implementasi kebijakan Simpeg pada Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan Simpeg di Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Stuktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Simpeg pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Hasil kegunaan Laporan KKL ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan penulis, Laporan KKL ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan Penulis mengenai efektivitas dalam menerapkan Sistem Informasi yang diimplementasikan melalui penggunaan Sistem Informasi di Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.
2. Secara teoritis, Laporan KKL ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam usulan penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan *e-government.*
3. Secara praktis, diharapkan Laporan KKL ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai di dinas perhubungan propinsi jawa barat, khususnya dibidang sistem informasi manajemen dalam memberikan pelayanan informasi secara efektif dan efesien.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan roda Pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat salah satunya dengan penggunaan tehnologi. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan dikenal dengan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

sebutan *e-Government*, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan.

Penggunaan teknologi secara elektronik dalam kenyataan dan prakteknya adalah pengolahan data dengan menggunakan jaringan komputer dan semua sarana pendukungnya dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran biaya. Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai ahli untuk mengoprasionalkan jaringan komputerisasi tersebut.

Pelaksanaan dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Pelaksanaan juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : "*implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*" maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi pelaksanaan dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) dalam rangka menunjang efektivitas kinerja pegawai dinas perhubungan propinsi jawa barat, dimaksudkan agar dalam pelaksanaan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Simpeg diharapkan dapat membawa ke suatu hasil (akibat) melengakapi dan menyelesaikan tujuan yang akan di capai yaitu peningkatkan kinerja pegawai. Pelaksanaan Sistem informasi manajemen kepegawaian juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu yang memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu dimana tjuan yang akan dicapai adalah peningkatan efektifitas pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah:

> "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Meter dan Horn dalam Wahab, 2005:65).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Sedangkan menurut Burch, implementasi sistem didefinisikan sebagai : "suatu implementasi yang terdiri dari rencana implementasi sistem dan pelaksanaan sistem yang menggambarkan tugas-tugas yanng diperlukan dalam pengimplementasian suatu sistem".

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Jadi berdasarkan pengertian di atas, implementasi biasanya menunjukan seluruh upaya perubahan melalui sistem baru. Sistem dibuat untuk memperbaiki atau meningkatkan pemprosesan informasi. Setelah dirancang, sistem diperkenalkan dan diterapkan kedalam organisasi pengguna. Jika sistem yang diterapkan itu digunakan oleh anggotanya maka pelaksanaan sistem dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika para penggunanya menolak sistem yang diterapkan, maka pelaksanaan sistem tersebut dapat digolongkan gagal.

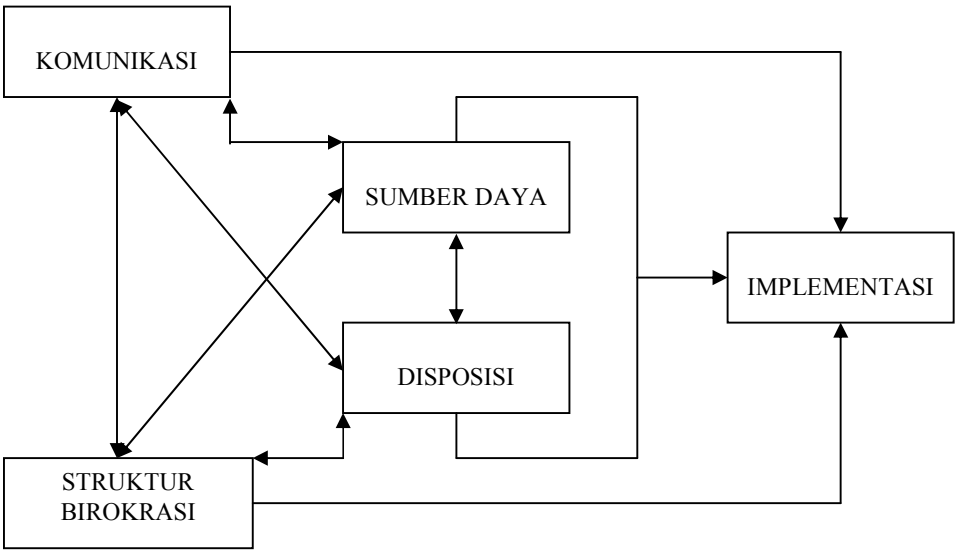
Berdasarkan pengertian implementasi menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Agustino, mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
   (Edward III dalam Agustino, 2006:149).

Dengan demikian, model pendekatan implementasi menurut Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang dikutip Agustino, dapat digambarkan sebagai berikut:

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Gambar 1.1
Model Pendekatan Implementasi Menurut Edward III



Sumber : Edward III dalam Agustino (2006:150)

Keberhasilan suatu implementasi menurut Edward III yang dikutip Agustino dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas, yaitu : *Kesatu* menurut Edward III adalah komunikasi, bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Kedua menurut Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan implementasi adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut Edward III sumber daya merupakan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

sumber penggerak dari implementasi. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn, sumbar daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Ketiga menurut Edward III adalah disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai implementasi. Jika implementasi ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Keempat menurut Edward III adalah struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemunkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi (Edward III dalam Widodo, 2006:150-151). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Sumber daya merupakan keberhasilan proses merupakan hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. Menurut Edward III sumber daya terdiri dari fasilitas dan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. (Edward III dalam Agustino, 2006:151).

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana). Hal ini sangat penting karena kinerja pelaksanaan kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan *platform* yang kompatibel bagi semua Departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standarisasi bagi beberapa hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Beberapa yang akan dilaksanakan termasuk pengembangan *e -Government* melalui semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah. Untuk keperluan itu, pemerintah akan meningkatkan kesadaran dan kesiapan pengguna kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan *e - Government* secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian Pegawai Negri Sipil di semua tingkat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 1995:14). Kebijakan penerapan *e-Government* bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan suatu tujuan dalam penerapan *e-Government* untuk mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Menurut Carl Friendrich kebijakan adalah :

> Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (Dalam Winarno, 2005:16).

Sistem informasi merupakan bentuk penerapan dalam sebuah organisasi, dimana penerapan/penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi tersebut untuk mendukung dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menyediakan informasi yang berguna di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Suatu organisasi yang tumbuh dan menjadi lebih kompleks membuat manajemen melakukan permintaan yang semakin besar terhadap fungsi sistem informasi. Menurut pendapat Azhar Susanto dalam bukunya Konsep dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen; mendefinisikan sistem informasi, sebagai berikut:

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

> "Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan" (Susanto, 2004:42).

Dengan demikian sistem informasi adalah suatu sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi adalah (kesatuan) formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Dari organisasi ke organisasi, sumber daya ini disusun atau distrukturkan dengan beberapa cara yang berlainan, karena organisasi dan sistem informasi merupakan sumber daya yang bersifat dinamis.

Lebih lanjut menurut pendapat James B Bower dkk dalam bukunya *Computer Oriented Accounting Informations System* yang dikutip Teguh wahyono dalam bukunya *Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisi Desain dan Implementasi* menjelaskan pengertian sistem informasi, sebagai berikut:

> "Sistem informasi merupakan suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan" (Wahyono, 2004:17).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur informasi penting guna memproses tipe transaksi rutin tertentu yang

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Sistem informasi juga merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.

Sistem sebagai kumpulan/*group* dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi merupakan sebagai hasil pengelolaan data yang berarti dan bermanfaat. Dapat kita tarik suatu definisi baru dari sistem informasi sebagai kumpulan dari sub sistem apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dn bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Jadi berdasarkan pengertian diatas, sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian.

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai manajemen), berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agree* (melakukan), yang setelah digabung menjadi kata *manage* (bahasa Inggris) berarti mengurus. Adapun pengertian manajemen menurut Moenir, H.A.S, adalah sebagai berikut: “Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing suatu kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Moenir,

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

2006:24).

Jadi berdasarkan pengertian diatas manajemen meliputi upaya mengarahkan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan dengan menggunakan cara-cara tertentu, yang baik tujuan maupun cara tersebut ditetapkan oleh manajer.

Kombinasi dari istilah sistem, informasi, dan manajemen menjadi kata-kata baru yaitu “Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen menurut Azhar Susanto, adalah sebagai berikut :

> Sistem Informasi Manajemen SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah (Susanto, 2004:54)

Sedangkan menurut Sondang Sigian, sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut: “Sistem Informasi Manajemen SIM adalah pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang teat yang memberikan kemudahan bagi proses manajemen” (Siagian, 2006:45).

Salah satu cabang ilmu yang saat ini sangat berkembang pesat adalah ilmu manajemen. Ilmu ini telah melakukan intervensi keberbagai bidang ilmu lain, atau paling tidak telah menggandeng ilmu lain dalam pengembangannya. Kita kenal ada manajemen sumber daya manusia, manajemen perbankan, manajemen industri, manajemen keuangan, pemasaran, produksi, manajemen perkotaan, manajemen pemerintahan, manajemen pendidikan, manajemen sistem informasi, secara umum pengertian manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

semua faktor dan sumberdaya yang menurut suatu perencanaan (*planning*), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (*objective*) atau tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Siagian (2006:15) manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Terry dalam Moenir (2005:47) manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dari ketiga definisi tersebut di atas, ada tiga hal penting dalam definisi-definisi tersebut. *Pertama*, ada tujuan yang hendak dicapai; *kedua*, tujuan yang hendak dicapai memerlukan/membutuhkan tenaga orang lain; dan *ketiga*, kegiatan/aktivitas orang lain tersebut harus dibimbing dan diawasi atau dikontrol

Kepegawaian berasal dari kata pegawai yang artinya orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sistem informasi kepegawaian adalah suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya aparatur atau pegawai yang profesional.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Sistem informasi kepegawaian adalah kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan data dan informasi yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja untuk kepentingan pegawai yang bertujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai Propinsi Jawa Barat pada Biro Kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian.
2. Implementasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau suatu kelompok baik pemerintahan maupun swasta untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan pelaksanaan. Pelaksanaan Simpeg pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bertujuan agar dalam pelaksanaannya terdapat peningkatan efektifitas pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
3. Implementasi kebijakan Simpeg pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah pelaksanaan program aplikasi yang mencakup kegiatan pengengaturan pegawai dalam melaksanakan tugasnya memperoleh dan mengintegrasikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai guna mewujudkan profesional aparatur kepegawaian, yang terdiri dari indikator sebagai berikut:
   1). Sumber daya, merupakan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Simpeg pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Sumberdaya dalam penelitian ini meliputi:

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

a. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu sumber pelaksanaan yang paling penting karena SDM merupakan penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat diperlukan SDM yang dalam hal ini adalah aparat di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Simpeg tersebut. Untuk itu, dibutuhkan SDM-SDM yang berkualitas, terlatih dan mempunyai keahlian dalam bidangnya sehingga pelaksanaan Simpeg ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
b. Biaya, dalam hal biaya, Simpeg tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan dana atau modal yang tersedia. Pembelian alat-alat komputer, jaringan komunikasi ataupun sarana prasana yang memadai membutuhkan modal yang cukup agar pelaksanaan Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
c. Informasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat karena berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, sehingga pelaksana Simpeg harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

a. Wewenang, pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan dalam pelaksanaan Simpeg di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

2). Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, disposisi dalam kebijakan Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat juga diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Disposisi dalam penelitian ini meliputi :

a. Komitmen, adalah suatu keputusan yang harus dicapai. sikap ini harus dimiliki oleh pelaksana Simpeg karena dengan berkomitmen dia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Kejujuran, selain komitmen, kejujuran merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh pelaksana Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, karena kejujuran merupakan sifat terbuka apa adanya atau tidak ditutup-tutupi.

c. Tingkat pendidikan, adalah suatu jenjang usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

mengembangkan potensi dirinya, pendidikan yang tinggi mempengaruhi para pelaksana Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pengetahuannya sehingga akan menciptakan badan pelaksana yang berkualitas dan kompetensi yang dimiliki. Dalam pelaksana Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, harus juga memiliki kompetensi atau keahlian dalam mengelola Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sehingga akuntabilitas publik dapat terlaksana.

d. Norma adalah aturan-aturan bagi para pelaksana kebijakan, dengan adannya norma dapat membatasi sikap para pelaksana kebijakan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Norma atau aturan tersebut jelas akan mempengaruhi sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya, norma diperlukan agar dalam bertugas mereka tetap memperhatikan dan memperdulikan norma yang ada. sedangkan Sifat Demokratis Demokratis mempunyai arti memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpendapat dan menerima saran dan kritik. Sifat tersebut harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan kepentingan dan tujuan semula dari implementasi kebijakan Simpeg. Sifat demokratis tersebut juga harus dimiliki Dinas Perhubungan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana kebijakan simpeg, karena sikap tersebut dapat dijadikan sebagai kajian pelaksanaan Simpeg di Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan efektifitas Kinerja Pegawai.

3). Struktur Birokrasi, merupakan pelaksana di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam memberikan informasi kepegawaian. Struktur birokrasi dalam penelitian ini meliputi :

a. Standar prosedur, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Simpeg sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. Fragmentasi, penyebaran tanggung jawab oleh pelaksana Simpeg di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terhadap aktivitas pegawai di tiap unit-unit kerja.

4. Kinerja adalah hasil kerja aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam implementasi atau pelaksanaan Simpeg sesuai dengan tanggung jawab, ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan adalah mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan member informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau

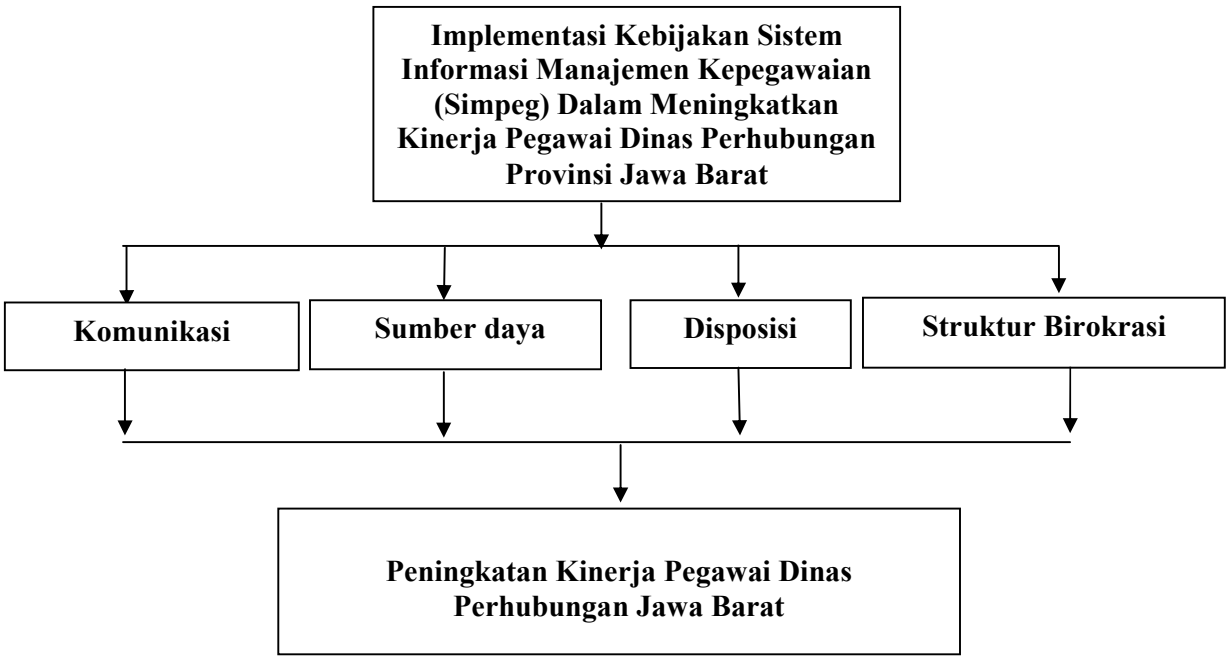
This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

standar yang bisa diterima, atau hasil yang bisa dicapai oleh organisasi yang setara.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka peneliti merumuskan proposisi. Santoso berpendapat bahwa proposisi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih konsep. (Santoso, 2005:26). Jadi proposisinya adalah keberhasilan Pelaksanaan tentang Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) dapat dilihat dari: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Adapun model kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

Bagan 1.2
Model Kerangka Pemikiran



This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1.6 Metode Penelitian dalam Laporan KKL

1.6.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada usulan penelitian ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan secara benar.

Pada Laporan KKL ini penulis menggunakan metode deskriftif . Pengertian metode deskriftip adalah :

> Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu cirri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu. Penelitian deskriftip dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian.(Burhan,Bungin,2001:124).

Berdasarkan pengertian itu, maka metode deskriptif menggambarkan tentang pengembangan sistem informasi manejemen dalam rangka menunjang efektivitas kinerja pegawai di dinas perhubungan propinsi jawa barat, dalam meningkatkan pelayanan sistem informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dianalisa dan interpretasi terhadap data tersebut.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai macam data, untuk memperjelas usulan penelitian, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yaitu menulis, melihat langsung kelapangan dengan pengamatan dan mencatat terhadap gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan efektivitas pengembangan sistem informasi dalam meningkatkan pelayanan informasi dalam menunjang efektivitas kinerja pegawai di dinas perhubungan propinsi jawa barat.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai atau berbicara secara langsung dengan nara sumber untuk dijadikan data yang kemudian dianalisa.

c. Studi Pustaka

Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan penulis untuk menambah wawasan berkenaan dengan teori-teori yang digunakan. Studi pustaka merupakan pengambilan data berupa referensi berdasarkan buku yang berkaitan dengan *e-government*, sistem informasi manajemen dan kinerja kepegawaian. Studi pustaka ini didapat dari buku, artikel dan dokumentasi untuk dikumpulkan sebagai teori yang dijadikan landasan dalam menyusun usulan penelitian

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1.6.3 Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisa data yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai efektivitas pengembangan sistem informasi di Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono menyatakan bahwa :

> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. (Sugiono,2005:1)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dianalisa oleh peneliti yang menekankan pada hasil yang dicapai dalam efektivitas pengembangan sistem informasi manejemen di dinas perhubungan propinsi jawa barat.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana *setting* tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar *grounded* dalam data (Suyatna, 2005:183).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari Sugiyono dengan bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif*, ketiga teknik tersebut sebagai berikut:

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

1.7 Lokasi dan Waktu Laporan KKL

Lokasi yang dijadikan tempat Laporan KKL yaitu Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Bagian Humas pengelolaan *Sistem Informasi* Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Jl.Sukabumi No.1 Telp. 7207257-7272258 Bandung 40132. Penjadwalan Laporan KKL sampai penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) terdiri atas

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Tabel 1.1
Jadwal Laporan KKL

No	Kegiatan	Tahun 2008				
		Juni	Agus	Sep	Okt	Nov
1	Mengajukan surat ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat					
2	Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan					
3	Pengumpulan data					
4	Penulisan laporan					
5	Pengumpulan laporan					

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com